

Vol. 2 No. 01, Januari - Juni 2014

ISSN: 2355. 1917

JURNAL

TAMADDUN

Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam

PERKEMBANGAN SENI MUSIK DAN SENI SUARA MENELISIK
KEJAYAAN ISLAM DALAM MATEMATIKA SEBAGAI LESSON LEARN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM
Kusaeri

TRAGEDI "BERDARAH" DI ACEH ABAD 17 M : TINJAUAN ULANG POLEMIK
PENYESATAN KONSEP WUJUDIYYAT HAMZAH FANSURI
Oleh Syaikh Nûr Al-Dîn al-Ranîrî
K. Muhamad Hakiki

IRAN MODERN : DARI MONARKI KE REPUBLIK ISLAM IRAN
Hajam

ANALISA SEJARAH SOSIAL TERHADAP KOMUNITAS ISLAM DI ASIA TENGGARA
(Studi Kasus Muslim Rohingya di Myanmar)
Ratna Puspitasari

PERGULATAN TIONGHOA MUSLIM DI SURABAYA Mencari Identitas
PADA MASA ORDE BARU 1967-1998
Shinta Devi Ika Santhi Rahayu

NILAI-NILAI ISLAM DALAM KITAB ADAT ADILULAH
DI KESULTANAN CIREBON ABAD KE-18 M.
Ibi Satibi

PEMERINTAH DAN KEMANDIRIAN BAHASA CERBON
Nurdin M. Noer

SEJARAH PERKEMBANGAN BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM ISLAM
Asrianti Rosmalina

MEMOTRET GOTRASAWALA DAN KARYA BESAR PANGERAN
WANGSAKERTA 300 TAHUN KEMUDIAN
Dadang Kusnandar

MENGEMBALIKAN PERDAGANGAN ISLAM YANG BERKEADILAN SEBUAH
ANTITESA TERHADAP PERDAGANGAN KAPITALISME GLOBAL
Zaenal Masduqi

TAMADDUN

Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam

ISSN 2085-7357

Tim Pengelola:
Penanggung Jawab
Yayat Suryatna

Redaktur
Jalaludin

Editor
Aah Syafa'ah

Sekretariat
Yayah Sa'diyah
Thamrin
Ahmad Ali Akbar Adikoro

Jurusan Sejarah Peradaban Islam
Fakultas Adab Dakwah Ushuluddin IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45232
(0231) 481264 Fax 489926.

Email: spi.tamaddun@gmail.com / spi.tamaddun@yahoo.com

Website: <http://web.iaincirebon.ac.id/spi/>

dicetak oleh :

CV. PANGGER Jl. Mayor Sastraatmdja no. 72 Gambirlaya Utara
Kasepuhan Cirebon Telp. 0231-223254
email : cirebonpublishing@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

SALAM REDAKSI — iii

PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PADA ERA
ISLAM KLASIK (610-1258 M) — iii

Yayat Suryatna — iii

DAFTAR ISI — vii

PERKEMBANGAN SENI MUSIK DAN SENI SUARA

MENELISIK KEJAYAAN ISLAM DALAM MATEMATIKA SEBAGAI LESSON
LEARN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM — 1

Kusaeri

TRAGEDI “BERDARAH” DI ACEH ABAD 17 M : TINJAUAN ULANG
POLEMIK PENYESATAN KONSEP WUJÛDIYYAT HAMZAH

FANSURI OLEH SYAIKH NÛR AL-DÎN AL-RANÎRÎ — 19

K. Muhamad Hakiki

IRAN MODERN : DARI MONARKI KE REPUBLIK

ISLAM IRAN — 53

Hajam

ANALISA SEJARAH SOSIAL TERHADAP KOMUNITAS ISLAM DI
ASIA TENGGARA

(Studi Kasus Muslim Rohingya di Myanmar) — 67

Ratna Puspitasari

PERGULATAN TIONGHOA MUSLIM DI SURABAYA MENCARI

IDENTITAS PADA MASA ORDE BARU 1967-1998 — 89

Shinta Devi Ika Santhi Rahayu

NILAI-NILAI ISLAM DALAM KITAB ADAT ADILULAH DI

KESULTANAN CIREBON ABAD KE-18 M. — 111

Ibi Satibi

IRAN MODERN : DARI MONARKI KE REPUBLIK ISLAM IRAN

Oleh : Hajam
Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Pendahuluan

Iran moderen merupakan tema yang selalu menarik untuk diamati. Faktor penyebabnya adalah karena Iran memiliki kekhasan tersendiri. Disamping corak Islamnya yang bukan beraliran Sunni, aliran mayoritas, tetapi Syi'ah, juga Iran merupakan satu-satunya negara Muslim, paling tidak untuk masa modern, yang melakukan revolusi sosial atas nama Islam. Sebab itu, revolusi tersebut acapkali dianggap sebagai katalisator kebangkitan Islam.

Sebagaimana revolusi lainnya yang mengubah dunia, revolusi Iran 1979 beserta hasil-hasilnya banyak menarik berbagai kalangan, tak terkecuali Barat. Buku atau sumber informasi lainnya terus mengalir, baik yang bersifat akademik atau propaganda, dari yang pro atau yang kontra. Ini karena revolusi tersebut memiliki keunikan tersendiri.¹ Pertrama, berbeda dengan revolusi lainnya, Revolusi Iran 1979 dipimpin oleh seorang Ayatulloh berjenggot yang dikucilkan Syah Iran (Muhammad Rezza Pahlevi yang berkuasa 1941-1979) dan dilakukan dengan atas nama Islam. Kedua, sesuatu yang sulit dipahami atau diprediksi sebelumnya, hingga oleh Khomeini sendiri, sang pemimpin, mengingat disamping Revolusi itu menumbangkan kekuasaan yang memiliki perlengkapan militer paling baik di Timur Tengah kala itu, juga begitu cepatnya meletus, dilihat dari rentetan perjalanannya.

Ketiga, satu-satunya revolusi sosial dan kebudayaan, jika ditilik dari perlibatan masa yang sangat banyak, yang dilakukan atas nama Islam, paling tidak untuk masa modern Islam². Keempat, karena memunculkan,

¹ Lihat Sukron Kamil, *Bani Sadr, Politik Iran, dan Pemikiran Ekonomi Tauhidinnya*, Laporan Penelitian Kepala Fakultas Adab IAIN Syarif Hidayatulloh, Jakarta, 2001.

² lihat, John L. Esposito, *Ancaman Islam; Mitos atau Realitas*, Bandung: Mizan, 1996, hal 114.

tidak saja, kekhawatiran “impor revolusi” tersebut bagi negara-negara mapan di kawasan Teluk Persi dan Timur Tengah, sehingga melahirkan Perang Iran-Irak (1980-1988), melainkan juga kekhawatiran “impor keyakinan” Syi’ah atau semangat Khomeinisme bagi negara-negara Sunni, termasuk Indonesia³.

Kelima, mengakibatkan dikenalnya secara luas tokoh-tokoh ulam dan intelektual serta pemikiran Islam Syi’ah oleh dunia Islam, termasuk di dalamnya Indonesia. Keenam, karena ketakterdugaan arah perkembangan Iran pasca Revolusi tersebut. Begitu banyak analisis dibuat orang, mulai dari wartawan, pengamat, hingga negawarawan yang memiliki reputasi internasional, tapi Iran seolah berkembang dengan hukum-hukumnya sendiri. Ketujuh, antiklimaksnya perjalanan revolusi itu sendiri. Hal itu, mengingat jika sebelum revolusi, karena adanya musuh bersama, yaitu Syah Iran, dan persamaan tujuan, yaitu penentangan kesewenang-wenangannya, maka semua kalangan, dari mulai yang komunis, nasionalis, ulama (mullah), atau non ulama tetapi berorientasi Islam, bersatu padu, namun tidak setelah terjadinya revolusi.

Pasca revolusi sebagaimana revolusi lainnya, koalisi, koalisi tersebut menjadi retak. Konsep kekuasaan oleh ahli hukum Islam (faqih) Khomeini membuat tersingkirnya, bukan saja tokoh-tokoh yang berorientasi Islam, tetapi juga intelektual non ulama yang berorientasi Islam. Hal itu, karena dalam pandangan politik ideal Khoemini tak banyak ruang bagi perbedaan pendapat⁴. Iran pun kemudian kehilangan otak cemerlangnya⁵, sesuatu, yang kalau boleh dikatakan, tidak sesuai rencana bersama sebelumnya. Dan diantara otak cemerlang tersebut adalah Bani Sadr, atau nama lengkapnya Abal Hasan Bani Sadr yang lahir pada tahun 1933 dan hingga kini masih hidup dan tinggal di Perancis.

³ lihat, M. Riza Sihbudi, *Bara Timur Tengah*, Bandung: Mizan, 1991, hal 165-225. Untuk kasus Indonesia, kekhawatiran akan meluasnya pengaruh Fundamentalisme Islam Iran di impor keyakinan Syi’ah, terutama kawin Mut’ahnya, terlihat dalam buku kumpulan hasil Seminar Nasional tentang Syi’ah di Jakarta, 21 September 1997 berjudul “Mengapa Kita Menolak Syia’ah”, Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam, 1998.

⁴ Baqir Moin, “Ayatulloh Khoemini Mencari Kesempurnaan; Teori dan Realitas” dalam Ali Rahnema, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Bandung: Mizan, 1995, hal. 99, atau Monggal Bayat, “Islam di Iran pada Zaman Pahlavi dan Setelahnya, Suatu Revolusi Kebudayaan”, dalam John L. Esposito (ed), *Identitas Islam Pada Perubahan Sosial dan Politik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hal. 169.

⁵ John L. Esposito, *Islam dan Politik*, of.cit, hal. 275

Berdasarkan sejumlah fenomena menarik di atas itulah, makalah ini disusun, sebagai salah satu tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang di bawah bimbingan guru besar yang sangat penulis hormati yaitu Prof. Dr. H. Muhaemin, MA. Makalah ini penulis susun dengan harapan agar bisa didiskusikan karena bagaimanapun makalah ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan. Oleh karena itu adanya sumbangan pertanyaan, saran dan kritik konstruktif serta positif tentu penulis sambut dengan tangan terbuka.

Revolusi Islam Iran : Latar Belakang dan Perkembangannya

Menurut Prof. Dr. J.W. Schaarl⁶, bahwa revolusi adalah fenomena-fenomena dimana terjadi perubahan dari dalam yang agak sekonyong-konyong dengan cara kekerasan dan fundamental mengenai struktur sosial, politik, dan kepemimpinan politik di masyarakat yang disertai perubahan-perubahan fundamental tentang ideologi, politik, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku dan tentang kebijaksanaan pemerintah.

Berdasarkan devinisi ini, Revolusi Islam Iran 11 Februari 1979 merupakan revolusi yang bisa dibandingkan dengan Revolusi Perancis atau Rusia yang kesohor. Revolusi Iran tidak bisa disamakan dengan revolusinya Cory di Philipina atau pun “revolusi” kaum Sandinista di Nikaragua. Jika “revolusi” Cory Aquino hanya berhasil mengubah struktur elite pengusaha, dan “revolusi” Sandinita di Nikaragua tidak didukung oleh golongan kelas menengah, sehingga kelihatan sangat rapuh. Maka Revolusi Iran telah berhasil menjungkirbalikkan semua tatanan dan struktur yang ada, baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Dan revolusi iran tidak hanya didukung golongan masyarakat “kelas bawah”, tetapi didukung oleh kalangan menengah, seperti para pedagang dan kaum cendekiawan⁷.

Sebagai sebuah peristiwa besar yang menggemparkan dunia, Revolusi Islam Iran 1979 tidaklah lahir dengan sendirinya. Ia dilatarbelakangi oleh berbagai faktor sosial budaya (agama), ekonomi dan politik.

⁶ Lihat, Schaarl, *Modernisasi*, Gramedia, Jakarta, 1980.

⁷ Lihat, M. Riza Sihbudi, *Dinamika Revolusi Islam Iran*, Jakarta: Pustaka Hidayat, 1989, hal. 32

Dari perspektif sosial, budaya, revolusi lahir kembali Shah Muhammad Reza Phalevi⁸ telah berusaha mengurangi pengaruh agama Islam yang telah berurat akar di kalangan rakyat. Ia telah mengubah penanggalan hijrah dengan Persia, lebih menghormati raja Cyrus yang Agung (Pendiri Kerajaan Persi) dari pada Nabi Muhammad Saw sehingga ia pun memperingati 2500 tahun berdirinya kerajaan Iran di depan makan Cyrus secara besar-besaran, dan memberikan keleluasaan bagi masuknya pengaruh kebudayaan barat.

Dari perspektif politik dalam negeri Shah telah melakukan proses de-Islamisasi dengan berusaha menghapus peran kaum agama (Mullah) dan menggunakan cara-cara represif untuk menumpas lawan-lawan politiknya. Sedangkan dalam politik luar negeri Shah sangat tergantung pada Amerika Serikat, dan tetap memelihara hubungan diplomatik dengan Israel, padahal selama itu Israel dianggap sebagai musuh umat Islam.

Sedangkan dari perspektif ekonomi, revolusi lahir karena strategi ekonomi pertumbuhan Shah yang semakin dalam, baik personal seperti antara yang kaya dan miskin, regional (antara desa dan kota), atau struktural (antara industri dan hankam di satu pihak dengan pertanian di pihak lain), disamping tingginya tingkat korupsi di kalangan keluarga dan kroninya⁹.

Para pengamat mengenai Iran modern memang terjadi perbedaan pendapat mengenai faktor terkuat yang melairkan revolusi, apakah kesenjangan ekonomi, korupsi sosial dan politik kerajaan sehingga kerajaan menjadi boneka Amerika Serikat dan masyarakat pun mengalami derasny westernisasi, atau faktor Islam. Akan tetapi, yang jelas, faktor Islam Syi'ah tidaklah bisa kita abaikan. Bahkan, mungkin ia berperan menentukan. Ada banyak hal yang bisa kita jadikan landasan.

⁸ Muhammad Reza Pahlevi pada tanggal 17 Desember 1941 dinobatkan sebagai Shah (raja) Iran ke dua Dinasti Pahlevi menggantikan bapaknya Reza Khan Shah, seorang komandan militer yang merebut kekuasaan pemerintahan di Iran pada tahun 1925, Reza Khan, pengagum Turki pada masa itu, Musthofa Kemal, bergerak dengan cepat untuk memodernisir negara dengan masyarakat Iran, dia tidak langsung melakukan sekulerisasi secara total terhadap masyarakat, seperti halnya Mesir, Reza Khan berikhtiar memodernisir Iran dalam bidang politik, militer, ekonomi, dan sosial, lihat, John L. Esposito, *Islam dan Politik*, terjemahan dari *Islam and Politics*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hal. 168

⁹ Lihat, M. Reza Sihbudi, of. Cit, hal. 34-35.

Salah satunya adalah dominannya peran ulama dan simbol-simbol yang diangkat seperti penyebutan Syah sebagai Yazid¹⁰.

Menurut M. Reza Sihbudi “agak sulit menentukan kapan sebenarnya Revolusi Islam Iran dimulai. Namun yang jelas pergolakan-pergolakan panjang yang mengakibatkan runtuhnya kekuasaan Syah berawal dari terjadinya demonstrasi di kota suci Qum, 9 Januari 1978. Sejumlah 4000 orang turun ke jalan-jalan raya meneriakan “*kami tidak menginginkan pemerintah Yazid*” (penguasa Dinasti Umayyah yang dalam Islam Syi’ah simbol kezaliman) dan “*kami menerikan pemulangan Ayatulloh Khomeini*”.

Kepolisian dan tentara datang menyergap masa demonstran dengan senjata. Dalam peristiwa itu banyak sekali masa yang terbunuh, yang karenanya peristiwa itu dikenal dengan “*QUM MASSACRE*” (Pembunuhan massal di Qum). Pemicu demonstrasi ini adalah pernyataan Menteri Darius (Menteri Penerangan) yang dinilai menghina Khomeini dan menuduh pemuka-pemuka keagamaan sebagai kaum reaksioner hitam yang bersekongkol dengan komunis internasional. Selain itu, dia juga menuduh bahwa Khomeini adalah seorang asing yang pada masa mudanya menjadi spion Inggris, menjurus pada kehidupan yang bejat, dan diatas segalanya, menulis ssajak sufi yang porno.

Pada bulan berikutnya, pebruari 1978, demonstrasi-demonstrasi di Tibriz, Yazd, dan Qum berubah menjadi kerusuhan umum sewaktu berlangsungnya tembakan-tembakan dari pihak kepolisian, pasukan tank, dan helikopter. Kaum perusuh itu menyerang seluruh lambang keluarga kerajaan dan negara yang dimoderenisir ala Barat. Rangkaian berbagai peristiwa mencapai puncaknya di Teheran pada peristiwa “*Black Friday*” (Hari jum’at yang Hitam). Pada hari jum’at 8 september 1978, sejumlah 75.000 orang melakukan demonstrasi duduk bersama di lapangan Jaleh. Saat militer dan kepolisian tidak mampu membubarkan mereka, maka mereka pun ditembaki dengan senapan mesin¹¹.

Menghadapi peristiwa itu, Shah mengganti beberapa kali kabinetnya tetapi tidak bisa meredakan situasi. Akhirnya, Shah pun meninggalkan

¹⁰ Smith Al Alhdar, “*Revolusi Iran dan Kiprah Khatami*”, dalam pengantar Muhammad Khatami, *Membangun Dialog antar Peradaban, Harapan dan Tantangan*, Bandung: Mizan, 1998, hal. 19.

¹¹ Lihat, John L. Esposito, *Islam dan Politik*, terjemahan dari *Islam and Politics*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hal. 269-271.

negaranya pada tanggal 11 Januari 1979, kemudian Khomeini sebagai simbol perlawanan dan tokoh pemersatu yang telah menggerakkan revolusi dari Paris Perancis kembali ke Iran 1 Pebruari 1979, dan beberapa hari kemudian, 11 Pebruari 1979, Angkatan Bersenjata Iran mengeluarkan pernyataan sikap netral dalam mengangapi konflik yang terjadi antara para pengikut Khomeini dan para pendukung Shah. Tiga peristiwa itu merupakan tiga rangkaian peristiwa yang menandai runtuhnya kekuasaan Shah dan mengarah pada kemenangan Republik Islam Iran dimana sebelum kembalinya ke Iran pada 5 Pebruari 1979 telah membentuk pemerintah sementara Republik Islam Iran di bawah Perdana Menteri Bazargan yang diawasi Dewan Revolusi yang didominasi kaum Mullah, yang dibentuk Khomeini tanggal 11 Januari 1979.

Revolusi yang dikobarkan khomeini dan para pengikutnya, tidak hanya sekedar berhasil menyingkirkan Shah, tetapi juga berhasil meruntuhkan bentuk monarki di Iran yang telah berumur dua ribu lima ratus tahun. Keberhasilan tersebut, terutama ditunjang oleh dua faktor yang saling berkaitan. Di satu pihak tercipta persatuan di kalangan penentang Shah, di lain pihak muncul Khomeini sebagai tokoh pemersatu, dan sebagai “lambang” perlawanan.

Perombakan konstitusi yang terjadi kemudian merupakan peristiwa yang menunjukkan era baru Iran secara *de jure* pasca revolusi. Peristiwa itu adalah peristiwa diadakanya referendum nasional untuk menentukan bentuk kenegaraan pada tanggal 30-31 Maret 1979.

Dalam referendum itu, rakyat hanya diberi Khomeini dua pilihan “Republik Islam Iran atau Monarki”, kendati ada tuntutan dari sejumlah kelompok politik agar pemilih diberi pilihan yang luas. Menurut data yang dikeluarkan pemerintah, mayoritas rakyat Iran (98%) memilih bentuk Republik Islam. Sebab itulah, Khomeini pun kemudian memproklamirkan terbentuknya Republik Islam Iran pada tanggal 1 April 1979. Dunia menyaksikan pembentukan dan pelebagaan Republik Islam Iran. Khomeini dan revolusinya tampil mewujudkan komponen legitimasi Republik Islam: anti imperialisme dan nasionalisme, agama dan identitas nasional budaya, partisipasi politik dan konstitusionalisme¹².

Pada tanggal 2-3 Desember 1979, konstitusi baru Iran direferendumkan. Hasilnya, konstitusi baru disahkan, menggantikan

¹² Lihat, John L. Esposito & John O. Vall, *DemokraSI di Negara-negara Muslim*, Mizan, Bandung, 1995, hal. 80.

1906. Menurut konstitusi 1974, Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi di bawah kekuasaan fuqaha itu sendiri sebagai ahli syariah. Khomeini menegaskan bahwa pemerintahan oleh para ahli hukum itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw¹³. Presiden katanya adalah kepala negara yang dipilih untuyk masa bakti 4 tahun dan berhak untuk memilih perdana menteri, mensahkan nominasi menteri-menteri, menandatangani hukum untuk diterapkan dan memveto keputusan yang dikeluarkan dewan menteri atau kabinet¹⁴.

Perkembangan selanjutnya mengenai gagasan *Wilayatul-e-Faqih* (Pemerintahan Ahli-ahli Hukum), oleh Khomeini yang berisi antara lain¹⁵:

1. Para alim ulama yang berhak menjadi penguasa dalam sebuah negara Islam, adalah lelaki yang memiliki kecerdasan dan kepandayan yang luas sehingga mampu mengerahkan potensi masyarakat.
2. Seorang fuqaha berfungsi sebagai pewaris Nabi, oleh karenanya mempunyai tugas dan kewajiban untuk mempergunakan angkatan bersenjata dan aparat politik, demi pelaksanaan hukum-hukum tuhan, serta membentuk suatu sistem pemerintahan demi kemakmuran bangsa.
3. Membentuk pemerintahan atau negara Islam, hukumnya wajib bagi setiap umat Islam.
4. Negara atau pemerintahan Islam diperlukan demi tegaknya hukum-hukum Islam, karena hukum apapun tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya sesuatu kekuasaan eksekutif.
5. Di dalam negara Islam, para wakil rakyat tidak berhak membuat undang-undang, karena undang-undang atau dasar hukum (Islam) diperoleh langsung dari Tuhan, yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

Gagasan tersebut (*Wilayatul-e-Faqih*) ditolak oleh tokoh pembaru sekuler dan Islam seperti Mehdi Bazargan, dan Bani Sadr¹⁶ serta para

¹³ John L. Esposito & John O. Vall, *ibid*, hal. 83.

¹⁴ Syafiq Basri, *Iran Pasca Revolusi, Sebuah Reportasi Perjalanan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.

¹⁵ Seperti yang dikutip oleh M. Riza Sihbudi, *of.cit*, hal. 62.

¹⁶ Bani Sadr nama lengkapnya Abal Hasan Bani Sadr yang lahir pada tahun 1933 dan hingga kini masih hidup, ia adalah seorang tokoh intelektual non ulama yang berorientasi Islam, latar belakang pendidikannya bidang Ekonomi dan Sosiologi tingkat doktor Universitas Sarbajue, Perancis. Awalnya ia orang dekat dan kepercayaan Khomeini, bahkan dipilih rakyatnya menjadi presiden pertama Iran pasca revolusi pada tahun 1980, akan tetapi lama kemudian, tepatnya Juni 1981, ia digulingkan dari kursi kepresidenan oleh kaum Mullah, ia tersingkir dari arus politik Iran pasca revolusi. Selanjutnya dan dengan menyamar sebagai wanita ia pergi ke Perancis, kemudian ia menetap disana sampai saat ini. Sebagai seorang ekonom Islam, Bani Sadr memiliki pula pemikiran Ekonomi, yang disebutnya Ekonomi Tauhidi. Untuk lebih lengkapnya lihat Sukron Kamil, *of.cit.*, hal. 49-62.

Ayatulloh senior seperti Syariati Madari dan Taleqani. Mereka menganggap tafsir Khomeini mengenai pemerintah faqih itu sebagai inovasi tak berdasar doktrin Syi'ah dan mereka menentang pelaksanaannya. Mereka percaya bahwa para ulama harus tinggal di pesantren-pesantren dan masjid-masjid. Keterlibatan ulama dalam pemerintahan harus dibatasi dalam komite penasehat mengenai perundang-undangan dan kesesuaiannya dengan ajaran Islam.

Perdebatan konstitusional dan sifat eklektis dari konstitusi itu sendiri. Menurut John L. Esposito¹⁷ mencerminkan kerumitan upaya mencampurkan unsur teokrasi dan unsur republik dan didalamnya muncul ketegangan antara pendapat yang mendukung kedaulatan Ilahi dan kedaulatan rakyat, atau kepemimpinan ulama dan kepemimpinan cendekiawan. Perdebatan ini merupakan bentuk konflik internal pada masa pasca revolusi Iran.

Perkembangan selanjutnya Iran pernah konflik dengan Irak, bermula dari pembatalan secara sepihak Perjanjian Aljazair 1975, oleh pemerintah, 20 september 1980. Dua hari kemudian, 22 September 1980, pasukan Irak menyerbu Iran. Diantara faktor-faktor yang melatarbelakangi konflik tersebut, adalah adanya kekhawatiran para pemimpin di Irak terhadap pengaruh Revolusi Islam Iran, serta adanya ambisi Baghdad untuk menjadi "polisi" di kawasan Teluk Persi¹⁸, maka terjadilah perang Iran-Irak selama ± 8 tahun (1980-1988) yang merugikan kedua belah pihak baik secara fisik, ekonomi, budaya dan politik.

Stabilitas Politik dan Perkembangan Ekonomi Republik Islam Iran

Sejak tahun 1982-1983, Iran memasuki masa stabilitas di bidang politik, yang antara lain ditandai dengan semakin mantapnya kekuasaan kaum Mullah di bawah kepemimpinan Imam Khomeini dan Presiden Ali Khomeini, Ali Khomeini adalah seorang pembantu dekat Khomeini dan terpilih kembali pada Oktober 1985. Konflik di kalangan elite politik sebagaimana yang terjadi pada tahun 1979-1981 dapat dihindari.

Pada tanggal 15 Desember 1981, Khomeini mengeluarkan sebuah Dekrit yang di sebut "***Delapan Pasal Perintah Imam Khomeini***",

¹⁷ Lihat, John L. Esposito dan John O. Vall, of.cit., hal. 81

¹⁸ Lihat M. Riza Sihbudi, of.cit., hal. 37.

yang intinya menyatakan bahwa “Revolusi telah selesai, sudah tiba saatnya bagi rakyat Iran untuk hidup dalam ketentraman dan ketetapan”.

Di bawah Presiden Khomeini, pembangunan ekonomi mengalami kemajuan. Program pembangunan di berbagai sektor seperti pertanian, kesejahteraan rakyat, pendidikan, perdagangan luar negeri berjalan dengan lancar, meskipun perang masih berlanjut. Hal ini dimungkinkan karena telah tercapainya kestabilan politik di dalam negeri, serta keberhasilan Iran mengusir pasukan Irak yang sebelumnya menduduki daerah-daerah yang kaya minyak.

Pembangunan ekonomi yang di jalankan Khomeini lebih mengutamakan taraf hidup golongan masyarakat kelas bawah. Pemerintah Khomeini lebih memprioritaskan sektor pertanian dan kesejahteraan sosial. Hubungan ekonomi dengan negara-negara lain juga ditingkatkan. Sejak 1982, Republik Islam Iran memperluas hubungan luar negerinya, setelah kurang lebih dua tahun mengalami isolasi diplomatik. Akibat krisis sandara diplomat Iran lebih banyak mengadakan hubungan dengan negara-negara dunia ketiga, seperti Suriah, Libya, Aljazair, India, Pakistan, Turki, Korea Selatan, dan Indonesia. Dengan negara-negara tersebut Iran mengadakan persetujuan barter barang dengan minyak.

Di saat kemajuan ini, pada tanggal 3 Juni 1989 waktu setempat Ayatullah al-Uzma Ruhallah al-Musavvi al-Khomeini, Imam Republik Islam Iran kembali ke Rahmatulloh dengan tenang di Rumah Sakit Teheran. Jutaan manusia, dengan berbagai cara, menunjukkan rasa duka cita yang mendalam atas kepergiannya. Barangkali, selain dia, tidak ada satupun tokoh dunia pada waktu itu di zaman modern ini yang kepergiannya ditangisi begitu banyak umat manusia.

Jasad Imam Khomeini sudah menyatu dengan tanah di Taman Makam Pahlawan para syuhada, Behest-e-Zahra, Teheran Selatan. Tapi, dia akan tetap dikenang sebagai salah satu tokoh besar dunia. Bahkan terlepas dari pro dan kontra, sejarah telah mencatatnya sebagai pemimpin Islam terbesar pada abad 20 ini. Kebesaran nama Imam Khomeini, antara lain, terlihat dari keberhasilannya menggerakkan Revolusi Islam Iran yang meruntuhkan monarki Dinasti Pahlevi. Namun juga terlihat dari pemikiran-pemikirannya yang dalam kapasitasnya sebagai seorang ulama, kadangkala tampak “kontroversial”.

Betapa tidak, pemikiran-pemikiran Khomeini, khususnya di bidang politik, bisa menjadi “senjata” untuk membangkitkan rakyat Iran dalam

menumbangkan salah satu rezim yang dari segi militer — terkuat di Timur Tengah. Pemikiran-pemikirannya juga bisa membangkitkan semangat anti kemapanan dikalangan kaum muslim “fundamentalis” di berbagai belahan dunia¹⁹.

Menurut Dr. Najibullah Lafraire sekurang-kurangnya ada 25 buku yang ditulis maupun berasal dari ceramah-ceramah Khomeini²⁰. Namun sebagian besar karya Khomeini berhubungan dengan hukum Islam, Etika, dan Pengetahuan Umum. Pemikiran politik Khomeini baru dipublikasikan untuk pertama kalinya pada tahun 1941, yaitu dalam bukunya berjudul *Kasyful Asror* (Menyingkap Rahasia).

Sekilas Tentang Madzhab Syi’ah di Iran

Revolusi Islam Iran telah menempatkan Mazhab (Islam) Syi’ah sebagai salah satu faktor yang dominan. Pertama, karena penggerak utama Revolusi Islam Iran adalah para tokoh agama (kaum Mullah), dan kedua, karena mayoritas penduduk Iran menganut mazhab ini.

Iran adalah satu-satunya negara di dunia dimana sekitar 90% rakyatnya menganut mazhab Syi’ah. Latar belakang historis menjadi salah satu penyebabnya. Sekitar abad ke-7, putri seorang raja Parsi Khosru Yazdajird menikah dengan salah seorang Imam Syi’ah, yaitu Imam Husein bin Ali (anak Imam Ali bin Abi Tholib). Namun baru pada abad ke-16, Syi’ah menjadi agama (mazhab) resmi Iran, yaitu ketika dinasti Safawi mulai berkuasa tahun 1501-1722²¹.

Persamaan Syi’ah dengan sunni sama-sama mengakui prinsip dasar ajaran Islam (Rukun Islam) seperti percaya bahwa Allah adalah Tuhan mereka, Muhammad dan Al-Qur’an merupakan Nabi (Rosul) dan kitab suci mereka. Perbedaan keduanya terletak pada masalah kepemimpinan (imamah), khususnya setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Penganut Syi’ah berkeyakinan bahwa hanya Ali yang berhak menggantikan posisi Muhammad sebagai pemimpin umat Islam. Sedangkan kaum Sunni beranggapan bahwa Ali hanya salah satu pemimpin umat Islam (khalifah) diantara empat tokoh pengganti Nabi Muhammad SAW, dan Ali berada di urutan ke empat setelah Abu Bakar, Umar dan Utsman.

¹⁹ M. Riza Sihbudin, *ibid*, hal. 51-52.

²⁰ Najibulloh Lafraire, *Ideology of Revolution: A Normative Study of the Islamic Revolution in Iran*, disertasi doktor Universitas of Hawaii, 1986, cahpter IV, seperti yang dikutip M. Riza Sihbudi, *of.cit.*, hal. 51.

²¹ Mahmood Shehabi, “Syi’ah”, dalam Keneth W. Morgan, *Islam Jalan Lurus*, Jakarta: Pustaka, 1980, hal. 236.

Akibat dari perbedaan tersebut, maka dalam mazhab Syi'ah, para imam telah ditentukan oleh Allah dan Rosul-Nya, dan tidak boleh dipilih dalam satu pemilihan umum. Sebaliknya mazhab Sunni beranggapan bahwa masalah imamah merupakan masalah politik keduniaan belaka, dan harus ditentukan melalui suatu musyawarah ataupun pemilihan umum di kalangan umat Islam. Timbul pula perbedaan dalam bidang-bidang tertentu antara Syi'ah dan Sunni, diantaranya tentang Hadits sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Kaum Syi'ah mengakui terutama kebenaran Hadits yang diriwayatkan oleh perawi-perawi Syi'ah sendiri. Dan sebaliknya kaum Ahlu Sunnah, mempercayai kebenaran Hadits yang diriwayatkan oleh perawi-perawi Ahlu Sunnah sendiri²².

Disamping perbedaannya dengan mazhab Sunni, mazhab Syi'ah sendiri terpecah dalam beberapa aliran yang berbeda satu sama lain, walaupun sama-sama mengakui Ali sebagai Imam mereka. Aliran-aliran yang terdapat dalam mazhab Syi'ah tersebut, diantaranya adalah aliran Itsna 'Asy'ariyah (Dua Belas Imam), Zaidiyah, Isma'iliyah (Tujuh Imam). Aliran Isma'iliyah tersebut terbagi-bagi dalam beberapa sub-aliran, seperti DRUZE, Fathimiyah, Hasyasyim, dan Muqana.

Syi'ah Itsna 'Asy'ariyah atau dua belas Imam adalah aliran yang dianut oleh mayoritas penduduk Iran, yang berkeyakinan bahwa yang berhak menjaadi Imam (pemimpin) setelah Nabi Muhammad Saw tiada lain adalah Ali bin Abi Tholib dan keturunannya yang berjumlah dua belas. Kedua belas Imam tersebut adalah, Ali, Hasan bin Ali, Husein bin Ali, Ali Zainal Abidin (putra Husein), Muhammad al-Baqir (putra Zainal Abidin), Ja'far Ash-Shidiq (putra Baqir), Musa al-Kazim (putra Ash-Shidiq), Ali ar-Ridha (putra Kazim), Muhammad al-Jawad (putra ar-Ridha), Ali al-Hadi (putra al-Jawad), Hasan al-Ashari (putra al-Hadi), Muhammad bin Hasan al-Hadi (putra al-Ashari) dan Imam yang terakhir, yaitu Muhammad bin Hasan al-Mahdi dikenal sebagai "Imam Zaman" yang berarti Imam sepanjang masa²³. Menurut keyakinan kaum Syi'ah — yang juga diyakini sebagai orang-orang Sunni — Imam tersebut hilang sejak tahun 329 dan akan muncul kembali pada akhir zaman, untuk menyelamatkan umat Islam. Selama masa vakum tersebut "jabatan"

²² Yoesoef Sou'yb, *Pertumbuhan dan Perkembangan Aliran-aliran Sekte Syi'ah*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1982, hal. 10-11.

²³ Abu Bakar Aceh, *Syi'ah: Rasionalisme ddalam Islam*, Semarang: Ramadhan, 1980, hal. 27.

Imam diserahkan kepada seorang tokoh yang dianggap menguasai bidang agama dan hukum Islam. Ketaatan kaum Syi'ah terhadap tokoh tersebut, dianggap sama dengan ketaatan terhadap Imam yang dua belas, oleh karenanya, hukumnya wajib.

Kewajiban mentaati para Imam (Ali dan keturunannya) didasarkan pada hadits, yang merupakan salah satu sumber hukum agama Islam. Menurut kaum Syi'ah, beberapa saat sebelum meninggal dunia, Nabi Muhammad Saw bersabda: "Hai manusia, aku tinggalkan apa yang akan menghindarkan kalian dari kesesatan selama kamu berpegang teguh padanya, yaitu Kittab Allah dan kerabatku"²⁴.

Kemudian didasarkan bahwa pada diri Ali bin Abi Thalib terdapat keistimewaan. Disamping sebagai sepupu, menantu dan sahabat setia Nabi, Ali juga mempunyai sifat-sifat yang dianggap mulia, dan yang paling agung, Ali adalah pemuda pertama yang masuk Islam. Walaupun mereka tidak mengakui legitimasi kekuasaan tiga Khalifah pertama, namun kaum Syi'ah mengaku tetap mempercayai keutamaan semua sahabat Nabi.

Kesimpulan

Beberapa hal yang bisa kita garis bawahi dari paparan diatas adalah:

1. Revolusi Islam Iran merupakan sebuah fenomena yang menarik di abad 20. Betapa tidak, sebuah rezim (Shah Pahlevi) yang memiliki angkatan bersenjata terkuat di kawasan Teluk Persi dan didukung penuh oleh Amerika Serikat, akhirnya berhasil diporakporandakan oleh kekuatan rakyat yang dimotori para tokoh agama dengan Imam Khomeini sebagai pemimpin utamanya.
2. Republik Islam Iran merupakan produk revolusi tersebut, menjadi sebuah model yang sama sekali baru di dunia politik modern. Dialah Republik pertama yang memadukan lembaga-lembaga politik modern (seperti kepresidenan dan parlemen) dengan struktur *Wilayat-e-Faqih* (pemerintahan para Fuqaha). *Wilayat-e-Faqih* tampaknya bisa dianggap sebagai karya luar biasa Imam Khomeini yang dengan berhasil mentransformasikan konsep politik Islam Mazhab Syi'ah.

²⁴ A. Syarafuddin al-Musawi, *Dialog Sunnah Syi'ah*, Bandung, Mizan, 1983, hal. 35. Adapun teks Hadits tersebut adalah :

قال رسول الله ص.م.: يا ايها الناس تركت امرين ما ان تمسك بهما لن تضلوا ابدا كتاب الله و اهل بيته

Penutup

Fenomena Revolusi Iran 1979 masih tetap menarik untuk dikaji. Banyak teori-teori yang telah dikemukakan oleh berbagai pakar untuk menerangkan fenomena revolusi itu dengan tinjauan sosiologis, antropologis, ekonomis, politik, psikologi massa, keagamaan, dan sebagainya yang berdampak pada regional dan internasional.

JURNAL
TAMADDUN

Diterbitkan oleh:
Jurusan Sejarah Peradaban Islam
Fakultas ADADIN
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

ISSN: 2355. 1917

Nurjati
PRESS